

BAB 1**PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur pendirian Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Sebagai badan usaha, BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya skripsi ini disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. (Purnomo 2016: 3). Berangkat dari pengertian ini, BUMDesa secara spesifik tidak bisa disamakan dengan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditer Vennootschap* (CV) atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan bentuk dari hasil desentralisasi yang memberikan keuntungan tersendiri bagi desa-desa. Membangun perekonomian desa secara mandiri adalah tujuan utama supaya perekonomian desa bisa bergerak dengan cepat. Pembangunan ekonomi pedesaan tidak lepas dari campur tangan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam mendistribusikan semua sumberdaya alam maupun potensi yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan. Sebagai sebuah proses multidimensi melalui integrasi perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, pembangunan ditujukan untuk peningkatan

kualitas hidup masyarakat. Secara filosofis, pembangunan diartikan sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan beragam alternatif humanis untuk pencapaian aspirasi masyarakat.

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pembangunan di rancang dan dilaksanakan oleh sekelompok kecil orang yang telah diberikan amanat oleh masyarakat desa itu sendiri. Mereka adalah elite desa atau birokrat yang diharuskan mampu membangun perekonomian desa secara maksimal. Karena jika terjadi ketidakmaksimalan pembangunan baik itu dikarenakan oleh faktor internal atau eksternal akan mengakibatkan kemandekan pembangunan. Bukan hanya birokrat yang bertanggung jawab untuk pemaksimalan kegiatan ekonomi namun dukungan dari semua lapisan masyarakat juga merupakan bagian penting. Kehadiran aktor-aktor elite atau birokrat untuk menentukan arah kebijakan suatu desa. Namun, jika diantara elite-elite tersebut hadir dengan sebuah kepentingan pribadi maupun kelompok, maka kebijakan tidak akan bisa searah. Melainkan akan bercabang-cabang tujuannya karena penentu kebijakan mempunyai kepentingan yang pastinya berbeda.

Pemerintahan di semua jenjang dalam menjalankan desentralisasi terjebak pada hakikat desentralisasi itu sendiri. Karena desentralisasi yang berjalan mengedepankan desentralisasi administratif dan ekonomi serta desentralisasi pasar daripada politik. Sehingga menyebabkan alite-elite ekonomi (pengusaha) ikut campur dalam urusan desentralisasi tersebut (Aminah, 2014). Pengubahan pusat pengelolaan yang langsung diberikan kepada desa memberikan akses penuh elite desa dalam pengelolaan ekonomi desa. Ironisnya, banyak fenomena bahwa kekuasaan digunakan oleh sebgaiian kelompok-kelompok kecil untuk menguntungkan diri. Pada kasus ini, munculnya oligarki yang secara tidak langsung menggunakan kekuatan politisnya untuk menguasai aset-aset ekonomi desa serta mempengaruhi kebijakan ekonomi desa yaitu program-program BUMDesa. Hal ini dilakukan dengan cara mensub-ordinasi kepala desa supaya memberikan hak penuh secara ekonomi dan menghentikan program-program kegiatan ekonomi BUMDesa yang dapat mengancam kegiatan usaha ekonomi pengusaha-pengusaha lokal tersebut. Sebagai timbal balik mereka memberikan dukungan penuh kepada kepala desa dalam kepentingannya.

Dalam penelitian ini banyak sekali contoh kasus yang terjadi yang berkaitan dengan oligarki yang terjadi di desa-desa. Sebagaimana dalam penelitian yang telah dilakukan Cahyono (2005) tentang konflik elite politik di perdesaan yang mengungkapkan tentang kasus oligarki yang sangat mengental di masyarakat desa. Di desa Bero, Klaten praktek oligarki terjadi dalam bentuk pengelompokan antara dua kubu yang saling bertentangan di internal BPD. Kejadian ini merupakan lanjutan dari pertarungan pilkades sehingga BPD pecah dan menjadi dua kubu antara pendukung yang menang dan kalah. Kekuatan ekonomi menjadi sebuah senjata untuk mempertahankan kekuatan politik. Hal demikian ditemui pula di Desa Majasetra, ketika kasus bantuan beras operasi pasar khusus (OPK) digunakan semata-mata sebagai “peluru” untuk “menembak” kades. Kekuatan materi akan sangat diperhitungkan jika lawan memiliki materi yang lebih dibanding pihak mereka sendiri. Di sini otonomi desa telah berubah arti menjadi otonomi elite. Bahwa BPD secara sepihak merumuskan apa yang dimaksud dengan aspirasi rakyat, sementara yang sesungguhnya diperjuangkan ialah kepentingan dari segelintir elite desa. Di sini berarti pula bahwa BPD telah gagal menyerap aspirasi masyarakat, di lain pihak tidak terdapatnya partisipasi masyarakat dari berbagai elemen masyarakat secara luas dalam penyelenggaraan urusan publik, telah membuat tujuan otonomisasi desa menjadi tidak tercapai.

Di perdesaan, ada kecenderungan elite ekonomi (informal) mengambil arena perdesaan dan mulai mencampuri kegiatan politik formal desa, dengan cara mengatur kebijakan BUMDesa. Sebagai sebuah penekanan untuk menjelaskan fenomena BUMDesa ini maka dapat dilihat dalam konsepsi Robison dan Hadiz (2004), para pengusaha masuk dalam kegiatan politik untuk memonopoli aset-aset ekonomi. Menurut mereka perubahan ini adalah bentuk baru oligarki. Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa oligarki tidak begitu saja hilang bersamaan dengan berakhirnya rezim Soeharto, tetapi muncul dalam bentuk yang lain, oligarki bertransformasi menyesuaikan konteks politik yang dibarengi konsep neoliberalisme. Hal ini bisa dilihat dari demokratisasi, desentralisasi maupun deregulasi setelah tumbang rezim Soeharto.

Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa tidak adanya perubahan pola oligarki dikarenakan konsep oligarki didasarkan pada kekuasaan sumber daya material. Sehingga semakin signifikan kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu maka

mereka akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan pula dalam politik. Pada kenyataannya tidak akan ada sistem demokrasi yang mampu merubah bentuk oligarki. Hanya ada sebuah cara dimana distribusi sumber kekayaan yang tidak seimbang tersebut dihilangkan supaya tidak memberikan peluang kekuasaan yang terlalu kuat dan besar kepada sekelompok orang (Winters, 2011: 18).

Di balik BUMDesa yang berorientasi pada ekonomi pasar ada gagasan filosofis yang dibangun oleh pemerintah di dalamnya, karena dasar Undang-Undang Desa, BUMDesa dibuat untuk menjadi kekuatan ekonomi lokal yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. BUMDesa seharusnya menjadi sebuah tempat dimana peraturan dan pendistribusian sumber daya akan menjadi semakin mudah. Itulah salah satu tujuan desentralisasi dilakukan karena akan memberikan keleluasaan bagi suatu desa untuk tumbuh secara mandiri. Pada umumnya, konsep pembangunan desa harus jelas. Jika pada awal konsep pembangunan desa sudah tidak jelas maka pembangunan juga dipastikan tidak akan berjalan.

Di desa-desa yang pada umumnya yang berhasil melakukan pembangunan ekonomi pedesaan dilakukan secara gotong royong tanpa adanya konflik elite atau drama politik. Banyak desa-desa percontohan yang berhasil mengembangkan program-program ekonomi secara mandiri dan berhasil (bumdesku.co.id 2020, diakses 5 Agustus 2020). Ada beberapa usaha BUMDesa yang benar-benar mampu mengeluarkan output positif dari suatu program-program BUMDesa sebagaimana yang diharapkan. Contohnya seperti BUMDesa Tirta Mandiri di Desa Ponggok yang bergelut di usaha pariwisata dan menghasilkan omset dengan laba bersih 6.5 Milyar. Tidak hanya dalam bidang pariwisata, ada juga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 8.7 Milyar. Tentunya hal ini didasari atas tanggung jawab bersama dan semangat gotong royong. (bumdesku.co.id 2020, diakses 5 Agustus 2020).

Ada kesenjangan dalam pendirian dan pengembangan usaha yang dijalankan BUMDesa. Karena ada fenomena Praktek-praktek oligarki menjadi alasan kuat mengapa BUMDesa yang ditujukan sebagai wadah untuk membangun ekonomi menjadi stagnan dan terhambat. Para oligark dengan kepentingan pribadinya mempertahankan sumber kekayaan dan pendapatan tidak ingin menyerahkan aset-aset ekonomi kepada BUMDesa dan tidak ingin BUMDesa memiliki program-program

ekonomi yang dapat mengganggu kestabilan usaha mereka. Hal ini menimbulkan konflik tersendiri yang pada akhirnya berakibat kepada tujuan daripada BUMDesa.

Hadirnya para oligark inilah yang menyebabkan program-program desa tidak berorientasi dalam pembangunan ekonomi desa. Pembangunan hanya berorientasi kepada sebagian masyarakat kecil yang memiliki akses yang didapatkan dari kelompok oligark tersebut. Hasil kekayaan juga pasti hanya dinikmati oleh sebagian kelompok kecil saja. Masalah yang menimpa di Desa Prambontergayang bisa dilihat dari bagaimana BUMDesa dilarang untuk membangun program-program ekonomi seperti pengusaha kerajinan unit kreatif yang tidak ingin BUMDesa memiliki unit usaha kreatif karena bisa menghambat usaha unit kreatif mereka. Sehingga jika BUMDesa membangun unit usaha kreatif maka pengusaha akan kehilangan pekerja atau menaikkan upah serta pengusaha lokal tersebut terancam tidak akan selaku seperti sekarang dan akan tersaingi dan hal ini membuat kepala desa tidak mau membangun program-program ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan usaha para pengusaha-pengusaha lokal tersebut. Karena pengusaha-pengusaha lokal itu hampir semuanya adalah pendukung kades. Kepentingan para borjuasi dalam rumusan kebijakan desa lebih menjadi prioritas daripada kepentingan masyarakat. Kebijakan pembangunan usaha ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat yang pada kenyataannya tidak diperuntukkan untuk masyarakat desa karena adanya sub-ordinasi oleh oligark-oligark lokal.

Surat Keputusan Kepala Desa Prambontergayang Nomor : 188.45/20/Kpts/414.407.11/2017 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Prambontergayangkecamatan Soko Kabupaten Tuban Tahun 2017. Kepala Desa Prambontergayang telah menetapkan dan mengesahkan surat keputusan tersebut pada tahun 2017. Pada kenyataannya setelah surat keputusan tersebut tidak ada tindak lanjut dari pihak kepala desa untuk melakukan diskusi atau rapat secara konsisten demi terwujudnya suatu kegiatan usaha perekonomian. Masalah tersebut datang ketika Kepala BUMDesa meminta kepada kepala desa untuk disegerakan pembentukan suatu kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk memulai kegiatan BUMDesa tetapi kepala desa sangat sulit untuk diajak berkoordinasi. Sebenarnya kepala BUMDesa sudah mengetahui ada upaya mempertahankan kekayaan oleh beberapa pihak supaya aset-aset ekonomi serta program-program BUMDesa tersebut

tidak berjalan. Jika hal tersebut terjadi maka pastinya hasil dari BUMDesa tidak akan seluruhnya disalurkan demi kepentingan masyarakat desa Prambontergayang.

Upaya mempertahankan kekuasaan tersebut dimulai oleh beberapa pengusaha lokal desa dengan cara mengancam kepala desa dengan tidak memberikan dukungan politik jika aset ekonomi diserahkan kepada BUMDesa atau kepala desa menyetujui program-program BUMDesa. Kemunculan para pengusaha lokal dengan membawa ancaman politik afiliasi ini tentunya memberikan gambaran bahwa mereka adalah kelompok oligark atau dalam teori oligarki Winters mereka disebut oligark. Fenomena oligarki yang dilakukan oleh kelompok oligark menjadi sebuah halangan berat. Kondisi ini pasti akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat ditambah pengetahuan masyarakat yang tidak terlalu tinggi menyebabkan oligarki tidak bisa diberantas begitu saja.

Disini sudah cukup jelas bahwa persoalan-persoalan tersebut mengindikasikan adanya dinamika didalam pemerintahan. Kepentingan masyarakat yang terabaikan mengakibatkan konflik dalam pembangunan ekonomi pedesaan yang terjadi. Program-program pembangunan ekonomi tidak selaras dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dikarenakan kelompok oligarki memonopoli kekuasaan dengan tujuan tidak baik yaitu memonopoli kekuasaan yang hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang tidak terlalu peduli atau bersikap apatis menjadikan para elite yang berkepentingan tersebut melancarkan aksi mereka. Dorongan yang secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif yang ganda yaitu karena keapatisan masyarakat mendorong para elite penguasa untuk mengganggu kekuasaan ekonomi mereka.

Konflik elite politik merupakan suatu hal menarik yang sering dibahas. Ketika berbicara tentang elite desa pasti sudah terbayangkan bahwa elite merupakan sekumpulan orang yang memiliki kekuasaan dan kepentingan. Dinamika politik merupakan kekuatan politik yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat. Elite disini mampu untuk mempengaruhi kebijakan sehingga jalan atau tidaknya suatu pemerintahan merupakan kuasa elite. Peran penting bagi kelompok orang yang memiliki kekuasaan biasanya

tidak berjalan dengan baik pula. Adanya kepentingan pribadi, kepentingan politik menjadi hambatan dalam suatu pembangunan.

Pembangunan ekonomi pedesaan melalui BUMDesa tidak serta merta dapat dijalankan dengan mudah. Beberapa program BUMDesa yang dijalankan pasti mengalami kendala. Dalam menganalisis pembangunan ekonomi pedesaan dapat dilihat dari konsep pembangunan pedesaan. Elite desa seperti pengusaha memiliki kekuasaan dalam membuat atau memetakan konsep pembangunan desa. Kekuasaan yang dimiliki elite inipun tidak serta merta berjalan dengan baik. Konsep kepentingan elite seperti pengusaha tidak pernah jauh dari konsep politik untuk mempertahankan kepentingannya. Jika politik membahas tentang kekuasaan, pengambilan keputusan atau kebijakan publik maka elite adalah orang-orang yang mempunyai andil dalam mempengaruhi kebijakan tersebut. Keterlibatan elite seperti pengusaha dalam pembangunan ekonomi sangat berpengaruh dalam jalan atau tidaknya suatu kebijakan.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan ekonomi adalah faktor politik dan administrasi. Faktor politik membahas bagaimana birokrat desa dalam menjalankan roda perekonomian. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dalam dinamika tatanan kehidupan pedesaan tidak lepas dari peran elite desa pula. Seperti halnya desa Prambontergayang,¹ kepentingan elite pengusaha dalam mempertahankan usaha dan pendapatannya menjadi prioritas daripada kepentingan masyarakat. Sehingga pembangunan perekonomian menjadi stagnan atau tidak ada kemajuan. Misalnya, pembangunan program-program BUMDesa yang tidak kunjung disetujui sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan. Kemudian kepala desa menggunakan dana desa hanya untuk membangun infrastruktur demi kepentingan politik yang menguntungkan pribadi. Kepala desa tidak memiliki *political willing* dalam membangun desa dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Bahkan hubungan kepala desa dengan BUMDesa terbilang tidak komunikatif. Misalnya, tidak ada komunikasi yang baik antara kepala BUMDesa dengan kepala desa dalam hal menindaklanjuti program-program BUMDesa. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi kemajuan ekonomi desa sendiri. Sedangkan keuntungan akan ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil dari masyarakat tersebut.

¹ Desa Prambontergayang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

Persoalan-persoalan tersebut kemudian memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Ini disebabkan oligark-oligark tersebut adalah kelas dominan. Dalam analisis Marxian kelas oligark adalah kelas dominan di pedesaan sehingga kepala desa itu adalah perpanjangan tangan dari kelas dominan ini. Atas dinamika yang terjadi didalam elite pengusaha dan kepala desa inilah yang membuat pembangunan menjadi tidak maksimal. Kepentingan masyarakat yang tidak diprioritaskan karena tidak adanya *political willing* yang seragam dari beberapa aktor-aktor yang tidak selaras kepentingannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa realitas tersebut terjadi di desa tersebut dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pola oligarki terjadi di desa Prambontergayang sehingga memunculkan subordinasi terhadap kepala desa sehingga mengakibatkan program kegiatan BUMDesa tidak berjalan di desa Prambontergayang.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana para oligark terlibat dalam proses politik pada pengembangan BUMDesa di desa Prambontergayang?
2. Bagaimana dampak campur tangan dari oligark terhadap pembangunan BUMDesa di desa Prambontergayang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk keterlibatan oligark dalam pengembangan program BUMDesa di desa Prambontergayang.
2. Untuk menjelaskan dampak keterlibatan dari oligark dalam program kebijakan BUMDesa di desa Prambontergayang.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola oligarki dalam mempengaruhi program-program BUMDesa dalam pembangunan BUMDesa yang terjadi karena adanya oligarki yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal desa. Elite desa seperti pengusaha maupun birokrat memiliki kekuasaan untuk memonopoli sumber daya yang ada. Tetapi dengan adanya para oligark kemudian BUMDesa tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga muncul masalah-masalah yang

membuat pembangunan ekonomi di desa melalui BUMDesa stagnan atau tidak mengalami kemajuan. Sehingga tujuan daripada tercapainya kesejahteraan masyarakat belum tercapai bahkan jauh dari kata itu.

Program-program pembangunan ekonomi tidak selaras dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dikarenakan para elite memonopoli kekuasaan dengan tujuan tidak baik yaitu memonopoli kekuasaan yang hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang disebut oligarki. Secara konseptual oligarki adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil (Winters, 2011: 1).

Para oligark ini memanipulasi kepala desa untuk tetap memberikan kekuasaan ekonomi dengan imbalan mereka akan memberikan dukungan penuh kepada kepala desa. Hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini adalah mengetahui realitas yang sedang terjadi di desa Prambontergayang dan menyajikannya secara sistematis.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Oligarki

Proposisi dari teori oligarki adalah konsep dikotomik tentang beroperasinya kuasa para oligark yang berbasis pada kekuasaan atau kekayaan material yang sulit dipisahkan dan diseimbangkan (Winters, 2011). Pengertian oligarki atau makna oligarki yang sangat umum menimbulkan keaburan dalam memahami secara kontekstual. Pada umumnya yang disebut oligarki adalah pemerintah yang dilakukan oleh segelintir orang. Ketika hal ini dikiaskan kepada sebuah contoh demokrasi dimana yang memerintah juga hanya sekelompok kecil orang atau minoritas memimpin mayoritas. Hal inilah yang menunjukkan bahwa untuk memahami oligarki tidak semudah itu. Dibutuhkan pemahaman yang konstruktif untuk bisa memahami maksud dari oligarki.

Dalam bukunya, Winters (2013: 2) menyebutkan bahwa titik awal untuk memahami politik Indonesia adalah pengamatan bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem menghasilkan ketidaksamaan politik yang ekstrem juga. Baik dalam

demokrasi atau sistem otoriter. Semakin timpang distribusi kekayaan maka semakin besar kekuatan dan pengaruh individu yang memiliki kekayaan. Sehingga kesenjangan material akan semakin intens mewarnai motif politik yaitu tujuan oligarki.

Winters (2013: 3) menyatakan hal yang serupa bahwa fokus oligarki berakar pada teori sumber kekuasaan. Sebagaimana yang telah diartikulasikan oleh Korpi², teori ini dimulai dengan pendistribusian kekuasaan melalui komunitas politik. Perbedaan pada sumber kekuasaan terutama ketika sumber kekuasaan tersebut sangat besar yang dapat memberikan dampak kepada apa yang dilakukan elite. Bentuk kekuasaan yang penting bagaimana mereka dapat masuk dan siapa yang memiliki kekuasaan dan pada skala apa, dan bagaimana distribusi kekuasaan tersebut bergeser, apakah sulit untuk dinilai. Aktor yang bersaing harus terus mengevaluasi sumber daya mereka sendiri dan orang lain, dan bertindak sesuai dengan itu.

Studi mengenai oligarki menurut Winters juga berfokus kepada kekuasaan kekayaan. Hal ini menimbulkan adanya dampak politik kesenjangan material terhadap kesenjangan kondisi yang membuat bentuk-bentuk kekuasaan dan eksklusi minoritas oligarki berbeda dengan yang lainnya. Sehingga Winters menekankan bahwa teori oligarki harus menjelaskan bagaimana kekayaan yang terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi dan masalah politik tertentu bagi mereka yang memilikinya (Winters 2011: 8).

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai oligarki maka perlu dipahami bahwa pengertian oligark dan elite tidaklah sama. Banyak sekali penjelasan dari para tokoh politik yang membuat cukup kebingungan untuk memahami oligarki dan elite dalam dimensi kekuasaan. Disini Winters telah merumuskan oligarki sebagai teori yang mana pembahasan oligarki hanya akan berhubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Dimana aktornya akan disebut sebagai oligark. Pembahasan oligarki juga hanya akan berfokus pada bagaimana cara oligark mempertahankan kekayaan, tidak pada soal ekonomi dan politik.

² Walter Korpi, Penulis "Developments in the Theory of Power and Exchange," Sociological Theory.

Oligark adalah aktor yang hanya berfokus pada melakukan usaha-usaha politik untuk mengamankan harta dan mempertahankannya. Oligarki berbeda dengan minoritas kekuasaan lain karena kekuasaannya adalah kekayaan material. Hubungan antara kekuasaan dan uang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena uang memang terbukti memberikan dampak signifikan dalam suatu proses politik. Ketidaksetaraan dalam kekayaan akan menimbulkan ketidaksetaraan juga dalam berpolitik contohnya adalah ketika pemilihan umum adanya persaingan antara si kaya dan si miskin. Dari contoh tersebut cukup jelas gambaran yang akan dihasilkan tentang bagaimana arah pertarungan politik tersebut.

Dalam bukunya (Winters 2011: 9-10) memberikan konsep pertahanan kekayaan (wealth defense) menjadi dua komponen yaitu pertahanan harta (property defense) dan pertahanan pendapatan (income defense). Cara ini dilakukan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang datang dari luar. Teori oligarki adalah usaha untuk menjelaskan bagaimana kekayaan terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, masalah politik tertentu bagi yang memilikinya. Atau secara lebih spesifiknya oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material.

Setelah mengetahui penjelasan dari berbagai tokoh memang benar keduanya memiliki makna bahwa sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memonopoli kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tetapi, istilah elite digunakan sebagai konsep payung untuk para pelaku yang memegang kekuasaan minoritas terkonsentrasi di lapisan atas suatu komunitas atau negara. Dari sudut pandang tersebut, oligarki hanya suatu bentuk hak istimewa elite ekonomi (Winters 2011: 12). Dalam teori oligarki, pusat perhatiannya pada kekuasaan pelaku yang menggunakan sumber daya material di bidang politik dengan efek ekonomi yang penting. Kedua pendekatan sama-sama materialis tapi beda cara. Oligarki kebal terhadap reformasi kelembagaan karena oligarki tidak didefinisikan oleh kelembagaan tertentu. Seorang bangsawan feodal dapat menjadi oligark tetapi jelas bukan kapitalis dan seorang pemilik bisnis bisa menjadi kapitalis namun mungkin kekuasaan materialnya masih kurang untuk

menjadi oligark. Namun, jika ada ada pejabat kemudian dia dia mengumpulkan keuntungan pribadi maka dia menjadi elite sekaligus oligark (Winters 2011: 13).

Teori oligarki dan teori elit seringkali mengalami kerancuan dimana keduanya sama-sama dalam posisi kekuasaan dan pengaruh minoritas. Namun, pastinya keduanya memiliki perbedaan dengan jelas. Bukti perbedaan tersebut terletak pada pengaruh minoritas pada elit yang selama ini ditantang oleh perubahan demokratis, sedangkan oligarki bahkan belum memiliki kemampuan untuk menyesuaikan. Maka dari itu sumber daya kekuasaan merupakan hal yang sangat berhubungan yang biasa digunakan oleh elit maupun oligark. Jadi teori Winters dimulai dari penentuan oligark yaitu aktor yang berperan dalam sistem oligarki tersebut. Kemudian bagaimana oligark ini mempertahankan kekayaannya tersebut dan bagaimana bentuk kekuasaan oligark.

Tujuan oligark tidak lain adalah untuk mempertahankan kekayaan dibagi kedalam dua bagian yaitu pertama pertahanan harta dan yang kedua adalah pertahanan pendapatan. Pertahan harta merujuk kepada upaya oligark atau pihak luar seperti penguasa non-formal contohnya pengusaha untuk memastikan kekayaan mereka tidak diambil oleh pihak yang menginginkannya (Winters 2011: 34). Winters menambahkan mengambil atau menginginkan disini dapat dilihat dari dua sudut yaitu secara vertical dan secara horizontal. Secara vertical terjadi ketika Negara atau pengusaha mengambil harta dari atas. Kemudian secara horizontal ketika oligark lain berusaha menguasai harta oligark satunya (Winters 2011: 34).

Biasanya pertahanan harta dilakukan pada kondisi hukum yang lemah sehingga penggunaan kekerasan dengan senjata biasanya dilakukan sebagai bentuk pengamanan (Winters 2011: 34). Penggunaan kekerasan tidak hanya dilakukan dengan senjata tetapi ada cara-cara lain juga yang biasa dilakukan yang bersifat ancaman. Disini oligark demi mempertahankan pendapatan bisa melakukan cara dengan melibatkan kekuatan lain (Winters 2011: 36). Winters (2011: 48) menjelaskan bahwa terdapat tiga ciri utama oligarki:

1. Sifat ancaman terhadap kekayaan yang datang dari luar

2. Kadar keterlibatan langsung oligark dalam melakukan pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas kekayaan
3. Keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintah

Kemudian Winters (2011: 52-54) juga menjelaskan bahwa terdapat empat tipologi oligarki yaitu:

1. Oligarki Panglima (*Warring Oligarchy*) adalah kondisi ketika klaim atas wilayah sumber kekuasaan saling tumpang tindih karena tidak ada otoritas yang mengatur atas klaim kekayaan. Pengumpulan kekayaan dengan cepat paling banyak terjadi melalui penaklukan walaupun oligark panglima juga mengambil surplus dari produsen primer. Sumber daya pemaksaan dan material terjalin sangat kuat bagi oligark panglima sehingga nyaris tidak terpisahkan. Kapasitas pemaksa ada untuk pertahanan kekayaan dan kekayaan digunakan untuk memelihara kapasitas pemaksa.
2. Oligarki Penguasa kolektif (*Ruling Oligarchy*) adalah ketika oligark masih berperan besar secara pribadi dalam pelaksanaan kekerasan namun berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Contoh klasik oligarki kolektif muncul dalam bentuk ringan di konsul dan senat Yunani-Romawi kuno. Oligarki penguasa kolektif lebih tahan lama karena para oligark yang terlibat berperan lebih kecil secara pribadi dalam pelaksanaan kekerasan untuk pertahanan kekayaan. Oligark penguasa kolektif membagi biaya kekuatan pemaksaan kepada kelompok oligark yang notabene lebih kuat daripada oligark individu.
3. Oligarki Sultanistik (*Sultanistic Oligarchy*) adalah ketika monopoli sarana pemaksaan ada satu tangan, bukan Negara terlembaga yang dibatasi hukum (Chenabi & Linz 1998) dalam (Winters 2011: 53). Tipologi ini lebih mengarah kepada hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu. Wewenang dan kekuasaan dikuasai hanya sebagian besar oleh penguasa. Penguasa ini adalah penguasa yang memiliki kestabilan posisi di puncak rezim. Sedangkan para oligark yang ada dibawahnya sangat bergantung kepada penyediaan pertahanan harta dan pendapatan bagi para oligark secara keseluruhan. Oligarki sultanistik tidak memakai senjata sebagai alat pemaksaan

tetapi menggunakan alat kekerasan Negara atau mencampurkannya dengan sarana pemaksaan pribadi sang penguasa. Para oligark yang tidak bersenjata ini mempertahankan kekayaan dengan menginvestasikan sebagian sumber daya material mereka sebagai upeti kepada penguasa agar kekayaan tidak dirampas. Kekayaan kemudian diolah secara strategis.

4. Oligarki Sipil adalah ketika oligark tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung seperti oligarki sultanistik. Bedanya, dalam oligarki sipil yang menggantikan individu tunggal sebagai pelaksana pemaksaan yang mempertahankan harta oligarki, ada lembaga pelaku yang dikendalikan oleh hukum. Dalam bentuk murni oligarki sipil, para oligark menyerahkan sebagian besar kekuasaan mereka kepada pemerintah tak-pribadi dan terlembaga dimana hukum lebih kuat daripada semua individu. Pertahanan harta sudah disediakan oleh Negara sehingga upaya perlindungan hanya pada pertahanan pendapatan. Penting diketahui bahwa oligarki sipil tidak harus bersifat demokratis dan melibatkan pemilu. Amerika serikat dan india bersifat demokratis secara procedural, Singapura dan Malaysia bersifat otoriter lunak dan semua Negara tersebut adalah oligarki sipil.

Tipologi oligarki yang dibuat Winters tidaklah statis, dimana akan terjadi perubahan tipe satu ke tipe yang lainnya tergantung pada perkembangan situasi pada Negara tersebut. Seperti yang terjadi di Indoensia dimana oligark merupakan aktor yang berpengaruh pada ekonomi dan politik Indonesia. Para oligark memperoleh kekuasaan semasa presiden Soeharto menjabat. Sesudah tumbangnya rezim Soeharto, oligarki tidaklah menghilang melainkan berubah pola dan bentuknya. Semasa Soeharto tipe oligarki adalah sultanistik kemudian setelahnya berubah menjadi tipe penguasa kolektif (Winters 2014: 17).

Penentuan indikator oligark oleh Winters kemudian akan dijelaskan pada konsep yang telah dikemukakan pada teori oligarki. Definisi dari Winters tentang oligark merupakan definisi yang kuat untuk menggambarkan bagaimana oligark memiliki sifat alamiah yang selalu melakukan pertahanan kekayaan. Kemudian ciri-ciri oligark juga menjadi indikator siapa oligark yang dimaksud dan bagaimana oligark mempertahankan kekayaan mereka. Pola oligark menjadi

sangat penting sehingga pada penelitian ini maka konsep *wealth defense* dan konsep sumber daya kekuasaan menjadi sangat penting dan akan menjadi indikator untuk menjelaskan apakah elite yang berkepentingan merupakan seorang oligark atau bukan. Indikator untuk menjelaskan oligark tidak berhenti kepada definisi dan ciri-ciri oligark. Namun, proses pertahanan kekayaan dan alat yang digunakan juga merupakan konsep yang sangat diperlukan untuk menjelaskan secara rinci praktek oligark.

Di beberapa wilayah pinggiran Indonesia, termasuk sejumlah daerah yang memiliki sumber daya melimpah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, kaum oligark yang memiliki kepentingan tertentu akan berusaha mencari pengaruh secara langsung. Namun, harus dicermati pula dengan teliti bagaimana perangai oligark setempat memengaruhi kehidupan politil lokal, baik dalam analisis empiris atau penyusunan kerangka secara teoritis. Sumber daya material oligark lokal memang jauh di bawah sumber daya material yang dimiliki kaum oligark di tingkat nasional. Namun, sumber daya tersebut senantiasa terfokus pada suatu tempat tertentu dan dilengkapi dengan sumber kekuasaan yang lain yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari posisi sosial ekonomi kaum oligark di tingkat lokal (Michele and Thomas B Pepinsky 2014: 7-8).

Tentu hal ini menjadi penting bagi seseorang yang ingin mencoba memahami pengaruh kekayaan material terhadap politik lokal, serta kekuatan relatif sumber daya material dan non-material kaum oligark lokal dibanding penyebaran parsial sumber daya di daerah terkait oleh oligark nasional yang jauh lebih kaya. Bahasam tentang penurunan teori kedalam fenomena yang lebih rendah –dalam hal ini skala desa bukan kota-kota besar- tidaklah merendahkan analisis Winters. Tetapi, kemampuan menurunkan skala analisis ke tingkat lokal tetap sangat penting bagi pemahaman yang lebih lengkap tentang politik Indonesia (Michele and Thomas B Pepinsky 2014: 8).

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu desa memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Desa sebagai wilayah desentralisasi mendapatkan kebebasan untuk mengatur jalannya perekonomian sesuai dengan peraturan desa yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan desa.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1), desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjelasan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu:

1. Kepala desa dipilih secara langsung dengan masa jabatan 6 tahun.
2. Kepala desa memegang jabatan eksekutif.
3. BPD memegang jabatan legislatif.
4. Perencanaan pembangunan disusun dalam RPJM desa dan RKP desa.
5. Sumber dana desa berasal dari PAD, transfer (dana desa, ADD, lain-lain).
6. Anggaran desa yaitu APBDes.
7. Kekayaan yang dipisahkan yaitu BUMDesa.
8. Laporan-laporan semesteran yaitu laporan pelaksanaan APBDes.
9. Laporan-laporan tahunan, LPPD, LKPJ, info, masyarakat desa.
10. Laporan akhir masa jabatan yaitu LPPD, AMJDes. Laporan kekayaan yaitu laporan kekayaan milik desa.

Menurut Widjaja (2003: 27), kepala desa merupakan penguasa tertinggi di desa sebagai pemimpin formal maupun informal serta pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat untuk menjadi pemimpin. Kepala desa memiliki kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Musyawarah Desa serta kepada masyarakat.

1.6.2 Oligark

Dalam bukunya yang berjudul *Oligark*, oligark didefinisikan oleh Winters sebagai pelaku yang mengendalikan sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan pribadi (Winters 2011: 8). Winters juga menambahkan bahwa kekuatan material oligark bukan seperti borjuis kapitalis karena borjuis kapitalis yang seperti didefinisikan oleh Karl Max itu lebih condong kepada kepemilikan sarana produksi untuk menarik surplus.

Sedangkan oligark menggunakan sumber daya material dibidang politik dengan efek ekonomi.

Oligark adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaan sumber daya yang paling menonjol diantara bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Kekayaan menjadi sebuah materi yang bisa diubah dengan mudah menjadi pengejawantahan kekuasaan yang lain. Kegunaan kekayaan dapat dimulai dari membeli jabatan, menyewa massa dan milisi bersenjata (Winters 2014: 14).

Oligark adalah produk politik stratifikasi material yang ekstrem dalam masyarakat dan bukan hasil defisit demokrasi. Kaum oligark menyadari bahwa demokrasi bisa memunculkan potensi ancaman baru. Dalam sejarah zaman Aristoteles penuh dengan kegelisahan orang kaya tentang bagaimana kekuasaan demokratis di tangan banyak orang bisa mengancam stratifikasi dengan mengambil dan mendistribusikan kekayaan segelintir orang (Winters 2014: 16).

Para oligark dapat berdiri sendiri dan berkuasa atau melekat dalam suatu rezim otoriter dan demokrasi. Hal yang juga penting apakah oligark terlibat langsung dalam kekuasaan dan jika terlibat, apakah mereka berkuasa sebagai individu atau sebagai kelompok. Kombinasi faktor-faktor tersebut memunculkan empat jenis oligarki. Yaitu Oligarki panglima, oligarki penguasa kolektif, oligarki sultanistik, dan oligarki sipil³. Beberapa oligark terlibat langsung dalam kekuasaan saat mereka beroperasi di dalam lembaga partai dan bersaing memperbutkan jabatan sesuai dengan norma-norma dasar demokrasi. Pada waktu yang sama, para oligark dan orang diluar kelompok yang berkuasa terlibat dalam sebuah proses pembagian kekayaan. Adanya aturan dan norma di ranah politik demokratis tidak menjamin oligark bisa dijinakkan. Sebaliknya, hukum di Indonesia malah tunduk dan seringkali memihak kaum oligark dan elite (Winters 2014: 16).

Demokrasi di Indonesia direbut para oligark yang dimulai dengan sekelompok oligark yang berperan dibalik layar dalam menjatuhkan Soeharto sehingga posisi mereka hamper tidak mengalami gangguan selama bertahun-

³ Untuk penjelasan lebih luas dan eksplanatif; lihat, hal 12 bagian teori.

tahun. Transisi dari oligarki sultanistik dengan sekelompok orang amat sangat kaya dijinakkan secara pribadi. Kapasitas untuk menggunakan kekayaan secara strategis muncul sebagai salah satu sumber daya kekuasaan paling penting dalam politik electoral Indonesia. Soeharto tidak hanya menciptakan oligark Indonesia praktis dari nol. Tetapi juga mengendalikan mereka layaknya *Godfather mafia*. Tidak peduli seberapa besar dan kayanya Anda, Soeharto bisa saat menghancurkan Anda (Winters 2014: 17).

1.6.3 Kekuasaan Elite Lokal

Pengertian mengenai teori oligarki memang tidak mudah untuk dipahami secara harfiah, perlu adanya pemahaman yang konstruktif untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam mengenai makna oligarki dan kemudian indikator apa saja yang mampu merujuk kepada konsep yang dibangun oleh oligarki. Untuk membantuk dalam menjelaskan konsep oligarki maka dapat dilihat pandangan Joel, S Migdal (2004: 67) tentang kekuasaan lokal *strongmen*. Migdal menyebutkan kekuasaan *strongmen* membahas hubungan masyarakat dan negara dimana terdapat dominasi kekuasaan yang dilakukam oleh anggota masyarakat yang memiliki basis kekuasaan yang lebih seperti mafia atau tuan tanah. Kekuatan lokal *strongmen* digambarkan sama-sama memiliki praktek dominasi namun tentunya istilah dalam penggambaran oligark dan lokal *strongmen* berbeda.

Sebagaimana yang telah diteliti oleh migdal bahwa proses politik di tingkat nasional maupun lokal dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lokal (kapitalis maupun non-kapitalis), dalam hal ini orang-orang lokal yang menguasai sumber daya, yang dalam istilah Migdal disebut lokal *strongmen*. Dalam perkembangannya lokal *strongmen* ini bermacam-macam, tidak hanya menguasai sumber daya tetapi juga menguasai kapital atau pemilik modal. Ini adalah fenomena yang diteliti dalam penelitian ini. Karena di pedesaan orang-orang kuat ini terlibat dalam mempengaruhi program-program BUMDesa.

1.6.4 Sumber Daya Kekuasaan

Kekuasaan merupakan konsep yang sukar untuk dijelaskan. Hal ini dikarenakan konsep kekuasaan akan mengalami perubahan definisi tergantung keadaan. Beberapa jenis kekuasaan yang paling halus beroperasi secara kultural, structural atau dibawah sadar. Pendekatan sumber daya kekuasaan sangat bermanfaat untuk memahami oligark dan oligarki karena mengutamakan kapasitas, alat, atau posisi tertentu yang dimiliki orang dalam berbagai kadar dan digunakan demi pengaruh social dan politik. Oligarki disini didefinisikan oleh tipe dan ukuran sumber daya kekuasaan yang dikendalikannya mengandalkan penilaian kapasitas kekuasaan pada tingkat individu, bukan kelompok (Winters 2011: 17).

Fokus pada kaum oligark dan oligarki berada pada teori sumber daya kekuasaan. Teori sumber daya kekuasaan mengakui bahwa pengaruh dan kendali bisa sangat sulit diukur, serta kekuasaan yang dipegang tidak selalu dapat digunakan. Hal ini bisa saja terjadi karena terjadi benturan kepentingan dengan orang lain. Namun, ketika kepentingan memiliki tujuan yang sama maka aktor-aktor akan mendapatkan sebuah hasil kebijakan yang dapat menguntungkan tujuan ekonomi maupun politiknya. Pada intinya, pada waktu tertentu setiap anggota masyarakat memiliki kapasitas kekuasaan yang tidak pasti, bisa dimulai dari yang paling rendah ke paling kuat (Winters 2014: 13).

Winters (2011), menjelaskan harus dilakukan penentuan jenis-jenis kekuasaan yang dimiliki individu dan memperkirakan kualitas relatifnya. Setidaknya secara teori, kiranya dapat dihitung profil kekuasaan individual untuk tiap pelaku dalam masyarakat, kemudian urutkan tiap pelaku secara kuantitatif dari paling yang tidak berkuasa sampai yang paling berkuasa. Lebih lanjut lagi, Winters (2011: 19-26) memahami sumber daya kekuasaan individu dikategorikan menjadi lima hal yaitu:

1. Hak politik

Hak politik formal merupakan sumber daya kekuasaan yang paling tidak langka dan paling tersebar di tingkat individu. Hak yang dianggap kebebasan liberal mencakup satu suara untuk tiap orang, kebebasan berpendapat tanpa ditindas, dan kesempatan mendapat akses terhadap

informasi yang dimiliki semua orang dalam masyarakat. Hak politik akan menjadi benar-benar penting diantara individu jika bersifat makin eksklusif baik secara formal maupun secara praktik.

2. Kekuasaan jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi

Kekuasaan jabatan disini dimaknai sebagai suatu sumber daya kekuasaan yang punya pengaruh dramatis pada profil kekuasaan segelintir individu. Pada zaman modern, organisasi-organisasi yang mengkonsentrasikan kekuasaan dengan menghimpun sumber daya keuangan, jejaring operasi, dan pengelompokkan anggota atau bawahan yang bisa dipimpin atau dilibatkan.

Dalam membangun definisi oligark dan oligarki maka harus diperhatikan bahwa minoritas pelaku yang hanya memegang sumber daya kekuasaan jabatan resmi adalah elite bukan seorang oligark.

Situasi seperti ini berlaku dalam kasus dimana pejabat pemerintah yang keputusannya menentukan peruntukkan sejumlah besar uang publik dalam anggaran Negara dan pemimpin perusahaan yang mengerahkan sumber daya besar demi kepentingan perusahaan. Bisa jadi mereka adalah pelaku yang kaya secara pribadi, tetapi kapasitas mereka untuk mengatur uang dan modal publik atau korporat bukan disebabkan oleh kekayaan pribadi mereka melainkan sumber daya kekuasaan yang melekat pada jabatan resmi. Sekali lagi sifatnya sementara dan terkait keadaan. Jika mereka tidak lagi memegang jabatan semua kekuasaan individu yang mereka punya untuk mengatur uang atau memerintah organisasi langsung hilang.

3. Kekuasaan pemaksaan (koersif)

Sumber daya kekuasaan ini adalah salah satu yang paling sukar didiskusikan karena sifatnya sebagai komponen profil kekuasaan individu telah berubah secara radikal. Sebelum kemunculan Negara modern, kapasitas pemaksaan tersebar diantara banyak pelaku di masyarakat. Pemaksaan merupakan sebuah hal yang penting dalam pembahasan mengenai oligarki karena perubahan lokasi kekuasaan pemaksaan dari individu ke Negara adalah sumber terbesar perubahan hakikat oligarki dalam sejarah. Intinya, bahwa kekuasaan pemaksaan telah bergeser dari

sumber daya kekuasaan paling penting dalam oligark menjadi satu bentuk kekuasaan elite di Negara-negara modern, dimana pelaku mengelola kekerasan dalam lembaga resmi.

4. Kekuasaan mobilisasi

Sumber daya kekuasaan ini punya dua dimensi, dimana merujuk kepada kapasitas individu untuk menggerakkan atau mempengaruhi yang lain. Para oligark mendapatkan kekuasaan individu yang luar biasa dari kapasitas mereka mengaktifkan kekuasaan politik laten orang lain. Dimensi yang pertama ketika pelaku tidak memiliki jabatan resmi, senjata atau kemampuan memaksa tetapi menggunakan karisma pribadi, status, keberanian yang menjadi kekuatan social dan politik yang tangguh. Seperti Mohanda Gandhi, Martin Luther King.

5. Kekuasaan material

Kekayaan merupakan sumber daya yang mendefinisikan oligark. Kekayaan merupakan bentuk materi yang dikenal sebagai sumber kekuasaan ekonomi, social dan politik. Kekuasaan materi menjadikan keluwesan luar biasa dalam politik. Kekuasaan materil bisa membeli pertahanan kekayaan, baik dalam bentuk kemampuan pemaksaan atau menyewa jasa pertahanan dari professional yang ahli. Ukuran kekuasaan bagi oligark hanya dibatasi kekayaan yang bisa mereka kerahkan.

Setelah mengetahui kategori sumber daya kekuasaan maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan letak sumber daya kekuasaan terkonsentrasi pada poin terakhir yaitu kekuasaan material.

Menurut Winters (2011: 39) oligarki tidak merujuk pada sistem kekuasaan oleh sekumpulan pelaku tertentu. Oligarki menjabarkan proses dan tatanan politik terkait sejumlah kecil individu kaya yang bukan hanya berkuasa karena sumber daya material, melainkan juga terpisah karena berseteru dengan sebagian besar komunitas –termasuk dengan sesamanya-. Oligarki sudah ada sejak fajar sejarah dan akan terus ada sehingga tergantung bagaimana cara menghadapi tantangan politik tersebut.

1.6.5 Pertahanan Kekayaan

Tujuan oligark tidak lain adalah untuk mempertahankan kekayaan dibagi kedalam dua bagian yaitu pertama pertahanan harta dan yang kedua adalah pertahanan pendapatan. Pertahan harta merujuk kepada upaya oligark atau pihak luar seperti penguasa non-formal contohnya pengusaha untuk memastikan kekayaan mereka tidak diambil oleh pihak yang menginginkannya (Winters 2011: 34).

Winters menambahkan mengambil atau menginginkan disini dapat dilihat dari dua sudut yaitu secara vertical dan secara horizontal. Secara vertical terjadi ketika Negara atau pengusaha mengambil harta dari atas. Kemudian secara horizontal ketika oligark lain berusaha menguasai harta oligark satunya (Winters 2011: 34).

Biasanya pertahanan harta dilakukan pada kondisi hokum yang lemah sehingga penggunaan kekerasan dengan senjata biasanya dilakukan sebagai bentuk pengamanan (Winters 2011: 34). Penggunaan kekerasan tidak hanya dilakukan dengan senjata tetapi ada cara-cara lain juga yang biasa dilakukan yang bersifat ancaman. Disini oligark demi mempertahankan pendapatan bisa melakukan cara dengan melibatkan kekuatan lain (Winters 2011: 36)

Jadi teori Winters dimulai dari penentuan oligark kemudian bagaimana cara mempertahankan kekayaan dan seperti apa bentuk kekuasaan oligark. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Winters bahwa oligark adalah aktor yang hanya berfokus melakukan usaha-usaha politik untuk mengamankan harta dan mempertahankannya. Oligarki hanya berfokus pada bagaimana cara oligark mempertahankan kekayaan, tidak ajeg pada sistem ekonomi maupun politik. Seperti inilah proses pertahanan kekayaan jika disajikan dalam bagan.



Bagan 1.1 Proses Pertahanan Kekayaan

1.6.6 Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan ekonomi merupakan usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dan aktif menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pembahasan tentang pembangunan ekonomi pedesaan tidak lepas juga dari politik ekonomi. Politik ekonomi juga membahas tentang kekuatan politik pada ranah ekonomi. Kekuatan politik disini juga berarti tentang keseimbangan berbagai kepentingan elite desa yang saling bertentangan. Dalam hal seperti ini akan selalu memunculkan masalah analitis dalam hal memperbaiki sebuah negara, dalam hal ini maka konflik elite desa akan terjadi di desa. Seorang yang memiliki kekuasaan mempunyai dua tujuan dalam menyalurkan potensi yang mereka miliki. Pertama, potensi yang akan disalurkan demi kepentingan publik. Kedua, potensi yang akan digunakan secara pragmatis. Dimana dalam sebuah pemerintahan pasti akan ditemukan hal-hal seperti itu. Dalam pembangunan ekonomi tentunya akan dibutuhkan pemimpin yang bisa menyalurkan kepentingan publik demi kesejahteraan masyarakat.

Hubungan para elite desa sangat bisa mempengaruhi berjalan atau tidaknya sebuah pemerintahan. Seringkali para ahli pembangunan politik yang mana dalam pembangunan ekonomi desa adalah pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sebagai aktor penggerak seringkali mengesampingkan kesenjangan ekonomi politik dari program-program mereka. Mereka lebih memusatkan perhatian kepada kapabilitas orang-orang miskin daripada praktik pemiskinan suatu kelompok (Li Tania 2010). Kekuasaan yang dimiliki oleh elite desa ini memunculkan beberapa dilema politik. Hal ini biasanya akan ditemukan ketika pemerintah harus menjalankan praktek kekuasaan yang bertentangan satu sama lain karena adanya perbedaan kepentingan didalamnya.

Pembangunan ekonomi di desa tidaklah mudah. Jika pembangunan ekonomi di desa tidak merubah struktur ekonomi di desa maka terjadi sesuatu yang salah. Proses pembuatan keputusan tentang pembangunan ekonomi di desa yang bersifat elitis dalam arti tidak memberikan akses terhadap kelompok bawah untuk menikmatinya. Dalam pembangunan ekonomi di desa, diharuskan mempertimbangkan dan melihat aspek-aspek seperti berikut:

1. Konsep pembangunan ekonomi pedesaan
2. Pemberdayaan
3. Permasalahan yang dihadapi
4. Manajemen

Pertama adalah kejelasan konsep pembangunan ekonomi pedesaan dari awal diharuskan sudah jelas. Konsep ini terdiri dari tujuan, prinsip dan strategi. Tujuan adanya pembangunan secara umum adalah meningkatkan ekonomi untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Prinsip yang dimiliki setiap desa berbeda-beda, tergantung dengan apa yang ingin diprioritaskan. Strategi yang matang dan terkonsolidasi adalah kunci utama. Kemudian kedua yaitu pemberdayaan, masyarakat sebagai penduduk desa setempat diberikan akses untuk meningkatkan kapabilitas dan umumnya pembangunan ekonomi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Ketiga permasalahan yang dihadapi, mustahil jika suatu pembangunan tidak ada hambatan. Masalah yang seringkali terjadi mungkin masalah yang berasal dari eksternal maupun internal. Kemudian yang terakhir adalah manajemen, dibutuhkan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang baik dan juga bagaimana menganalisa potensi-potensi yang ada di desa.

1.6.7 Elite Desa

Terdapat masalah-masalah yang menjadi kendala dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi seringkali gagal karena pemerintah mengartikan pembangunan ekonomi mengenai lahan, sumber daya, lapangan kerja maupun upah merupakan masalah teknis yang bisa diperbaiki melalui intervensi pembangunan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga ketika masalah-masalah tersebut datang maka mereka akan mengesampingkan dan

menganggap itu adalah masalah teknis yang tidak bisa diselesaikan (Li Tania 2010). Ketika dilakukan perbandingan dengan desa di daerah lain yang sudah membuktikan bahwa masalah teknis tersebut bukan suatu hambatan melainkan bagaimana cara pemerintah berinovasi dan membuktikan bahwa ada kebijakan lain yang dapat dikembangkan. Di desa-desa yang tidak semua tersebar sumber daya alam maupun manusia yang mumpuni membutuhkan usaha lebih. Namun, seringkali kegagalan desa karena ketiadaan sumber daya alam maupun manusia yang mumpuni dijadikan alasan. Disebutkan bahwa di desa Prambontergayang memiliki beberapa sumber daya yang efisien dan dapat dijalankan sebagai sebuah program pembangunan ekonomi desa. Hal ini memberikan suatu pandangan positif bahwa desa bisa dikembangkan. Namun harus diingat kembali bahwa sumber daya alam merupakan objek mati sehingga harus ada penggerak agar tercipta suatu program yang dapat menghidukan perekonomian desa.

Konflik secara horisontal disini melibatkan antar masa pendukung, sedangkan secara konflik secara vertikal melibatkan pertentangan antar elite dalam sebuah perbedaan kepentingan. Persaingan tersebut akan memunculkan pemenang dalam menguasai kedudukan suatu sistem sosial utamanya sebuah pemerintahan, kemudian kelompok yang kalah akan menjadi basis oposisi pemerintahan yang menang. Konflik elite ini dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat Faktor penyebab, motif dan kepentingan politiknya, yaitu: Pertama, dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian disini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok yang kecil maupun dalam suatu kelompok yang besar (Moch Nurhasim 2005: 14).

Persaingan yang begitu ketat memperlihatkan adanya suatu kepentingan yang besar dari para elite politik. Elite dalam ranah lingkup luas seringkali memiliki kepentingan akan keuntungan besar yang lebih bersifat materi.

Sedangkan dalam lingkup daerah yang cenderung sempit lebih berfokus pada ranah kulturalisme dan status sosial di masyarakat. Karena kekuasaan sendiri memiliki kapasitas dan juga jumlahnya yang terbatas, sehingga pasti menimbulkan suatu gesekan atau konflik untuk memperebutkannya. Semakin tinggi sumber keuntungan yang didapatkan dari kekuasaan tersebut akan berpotensi menimbulkan suatu dinamika konflik yang berkepanjangan.

Program- program pembangunan perekonomian desa sudah sangat lama dicanangkan oleh pemerintah. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan dilihat dari daerah-daerah miskin yang presentasi kemiskinannya masih stagnan. Salah satu faktor yang menjadi problem analitis dalam pengembangan ekonomi di desa bisa jadi dikarenakan inervensi dari pemerintah yang terlalu besar namun realisasi dalam pewujudannya tidak terlaksana secara sistematis dan efisien. Hal ini menjadikan pembangunan ekonomi desa hanya sebuah wacana dan peraturan yang hanya dihimbaukan oleh pemerintah. Membangun sebuah desa tidaklah mudah, karena bukan hanya berbicara mendirikan struktur desa. Namun harus disertai keseriusan dalam upaya perencanaan program-program yang efisien.

Fatalnya, pemangku kepentingan yang membawa seluruh kebijakan tidak selalu berorientasi kepada masyarakat. Dinamika muncul beiringan dengan banyaknya elite yang memiliki beda pendapat. Masing-masing memiliki kepentingan yang bersebrangan dengan kepentingan publik. Elite desa seringkali menggunakan kesempatan itu diatas kepentingan masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak mendapatkan apa yang semestinya menjadi hak mereka. Ironisnya lagi, desa yang seharusnya menjadi subjek strategis malah digunakan oleh elite sebagai objek kekuasaan (Heru 2005). Masalah analitis yang muncul dari elite ini merupakan masalah yang klasik. Sering ditemukannya realita bahwa kepentingan individu atau sekelompok orang dalam suatu struktur kekuasaan menjadikan banyak hambatan dalam menjalankan fungsi dan tugas itu sendiri.

1.7. Metode dan Prosedur Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pola oligarki dalam mempengaruhi program-program BUMDesa dalam pembangunan ekonomi pedesaan melalui BUMDesa di desa Prambontergayang. Pembangunan ekonomi di desa Prambontergayang selama ini tidak merubah struktur ekonomi di desa sehingga proses pembuatan keputusan tentang pembangunan ekonomi di desa bersifat elitis dalam arti tidak memberikan dampak terhadap seluruh lapisan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan ekonomi melalui BUMDesa di desa terjadi bias elite desa. Sehingga pembangunan ekonomi desa hanya memperkuat posisi ekonomi elite desa. Kepentingan masyarakat yang tidak diprioritaskan karena tidak adanya *political willing* yang seragam dari elite desa yaitu pengusaha-pengusaha lokal yang bertransformasi menjadi oligark-oligark lokal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa realitas tersebut terjadi di desa Prambontergayang dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pola oligarki dalam mempengaruhi program-program BUMDesa yang terjadi di desa Prambontergayang.

1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexi 2006: 3). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini mengamati struktur BUMDesa sebagai program pembangunan ekonomi pedesaan, pola oligarki dalam mempengaruhi program-program BUMDesa yang serta dampak dari kemunculan dinamika tersebut. Peneliti akan mengamati secara jelas untuk menemukan realitas yang sebenarnya di desa Prambontergayang. Penelitian kualitatif mempunyai karakter dengan menjelaskan keadaan yang sesuai dengan realitas. Sehingga peneliti akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, sasaran utama dari penelitian ini adalah kelompok elit yang berkuasa di Desa Prambontergayang, elit agama, elit politik, elit birokrasi,

dan elit-elit sosial serta masyarakat secara umum yang turut berpengaruh pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sebagai berikut:

Tabel 1.1 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian	Sasaran Data
Kepala Desa Prambontergayang (Sayatri Handoko Warih)	Mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan ekonomi melalui BUMDesa sebagai elite desa atau birokrat yang memiliki kekuasaan tertinggi di desa.
Kepala BUMDesa Desa Prambontergayang (M. Adam Maclouv)	Mengetahui bagaimana peran kepala BUMDesa dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan ekonomi desa sebagai elite desa yang memiliki tugas mendirikan dan mengembangkan potensi desa untuk memajukan ekonomi
Kepala Urusan Perencanaan (Sasmito)	Mengetahui bagaimana peran Kepala Urusan Perencanaan terhadap pembangunan ekonomi desa melalui BUMDesa

Penggalian data kepala kepala desa ditujukan untuk mencari tahu keberpihakan kepala desa apakah kepala mewakili kepentingan masyarakat atau berpihak kepada pengusaha-pengusaha lokal desa. Sebagai kepala desa bapak Sayatri dianggap memiliki tanggung jawab penuh untuk merealisasikan program-program yang telah dirancang oleh BUMDesa. Peran kepala desa akan menentukan pelaksanaan BUMDesa. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Sayatri untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dan apakah kepala desa telah melakukan tugasnya untuk merealisasikan pembangunan BUMDesa.

Direktur BUMDesa menjadi informan kedua karena direktur BUMDesa mengetahui bagaimana jalannya BUMDesa dari pembentukan sampai pengesahan BUMDesa menjadi sebuah peraturan yang disahkan oleh kepala desa. Tujuan dari dilakukannya wawancara dengan bapak Adam selaku direktur BUMDesa juga ingin mengetahui apakah BUMDesa mendapatkan dukungan dari masyarakat atau

ada beberapa pihak yang melakukan perlawanan atas realisasi program BUMDesa sehingga akan mengetahui seperti apa pemahaman masyarakat terhadap kehadiran BUMDesa.

Informan ketiga yaitu kepala urusan perencanaan desa yaitu bapak Sasmito. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sasmito untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi di desa khususnya tentang pembangunan desa. Kemudian apakah pembangunan di desa khususnya BUMDesa telah memberikan sumbangsih terhadap desa atau terjadi bentuk penolakan oleh beberapa elite desa sehingga pembangunan tidak berjalan dengan semestinya.

Ketiga informan tersebut merupakan informan yang akan memberikan data berupa data fisik seperti hasil laporan pembangunan infrastruktur desa Prambontergayang maupun data wawancara yang kemudian peneliti akan menganalisa dan mengabstraksikannya kedalam sebuah temuan data dan hasil analisa.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Karena ingin mendapatkan data penelitian terkait konflik elite desa dalam pembangunan ekonomi pedesaan yang valid, penelitian ini dilaksanakan di desa Prambontergayang yang merupakan dataran dengan luas wilayah 559,230 Ha. Secara geografis desa Prambontergayang terletak pada posisi 7 derajat 05.44.4 Lintang Selatan dan 111 derajat 55.12.8 Bujur Timur. Secara administrative desa Prambontergayang terletak di wilayah kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan *in depth interview* (wawancara mendalam) kepada subjek penelitian. Orang tersebut dipilih dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Hal tersebut merupakan prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan subjek penelitian dan setelah itu dikaji dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara membangun kenyamanan yang sangat intens dengan subyek tersebut, setelah membangun sebuah kenyamanan ini yang dilakukan adalah dengan cara mencari

fokus dengan cara menembak sasaran yang akan di cari, kemudian yang dilakukan adalah dengan cara membangun kepercayaan yang tinggi dalam membangun kepercayaan antara informan dan peneliti guna menjaga penelitian yang baik. Penelitian ini juga ditunjang dengan adanya kumpulan dokumen, buku, jurnal, dan *websites*.

Hal ini bertujuan untuk mendapat kan hubungan yang kuat dengan cara mendapat hasil dari informan yang akurat dan hasilnya yang real. Di mana setelah melakukan sebuah wawancara mendalam, peneliti harus membuat sebuah transkrip yaitu sebuah uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap menyamai apa yang dilihat dan dijumpai serta didengar secara langsung maupun rekaman. Wawancara ditujukan kepada subyek penelitian yakni kepala desa dan badan permusyawaratan desa serta warga sekitar. Pengumpulan data lainnya bilamana memungkinkan bisa melalui observasi langsung. Faktor observasi ini merupakan hal yang di mana nantinya akan menemukan data yang akan di cari dengan cara yang sangat akurat dan baik. Dalam ranah wawancara di harapkan bahwa akan menemukan data yang *real*.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dan dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, teknik analisis data ini bertujuan agar data dapat tersusun rapi, dimulai dengan wawancara dengan pihak terkait yang dapat mengumpulkan bahan-bahan untuk menunjang penelitian. Langkah analisis data tujuannya untuk mencari data hasil temuan di lapangan dan kemudian data tersebut di data lalu di pilah-pilah sebagai informasi pendukung dalam penelitian. Dalam melakukan proses analisis data kualitatif terdapat dua metode atau tahapan tahapan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data dan penyederhanaan data yang merupakan kegiatan membuat abstraksi (Sugiono 2005: 49). Abstraksi adalah usaha menmbuat ringkasan inti dari semua penelitian yang di temukan pernyataan yang harus di jaga sehingga tetap berada di dalam penelitian tersebut, uraian data yang harus tersusun secara satu kesatuan, serta harus melakukan penarikan kesimpulan.

Dalam analisis data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang ditemukan oleh penulis kemudian akan diolah berdasarkan hasil transkrip pada saat wawancara. Hasil yang didapat saat wawancara ini kemudian dibaca dan di analisis agar mendapatkan gambaran umum yang kemudian di gabungkan dengan data tambahan yang di peroleh agar satu sama lain dapat berkaitan. Sedangkan dengan data sekunder adalah dengan melakukan filter terhadap data yang di dapat dan kemudian memilih yang akan data yang dipakai.

1.7.7 Struktur Penulisan

Struktur penulisan penelitian terdiri atas empat bab, yaitu: (1) Bab I Pendahuluan; (2) Bab II Gambaran Umum Penelitian; (3) Bab III Temuan dan Analisa Data; (4) Bab IV Kesimpulan.